**ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN KUMULASI ISBAT NIKAH DAN CERAI GUGAT (Studi Perkara Nomor 387/PDT.G/2022/PA.KAB.KEDIRI)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**CANDRA SETIYOKO**

NIM.101180136

Pembimbing:

**WAHYU SAPUTRA, M.H.Li**

NIP. 198705272018011002

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO

2024

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN KUMULASI ISBAT NIKAH DAN CERAI GUGAT (Studi Perkara Nomor 387/PDT.G/2022/PA.KAB.KEDIRI)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**CANDRA SETIYOKO**

NIM.101180136

Pembimbing:

**WAHYU SAPUTRA, M.H.Li**

NIP. 198705272018011002

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO

2024

**ABSTRAK**

Candra Setiyoko.2024. analisis yuridis tentang putusa kumulasi isbat nikah untuk

keperluan cerai gugat (Studi Perkara Nomor 387/Pdt.G/Pa.Kab.Kediri) Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.Pembimbing wahyu Saputra.M.H.Li

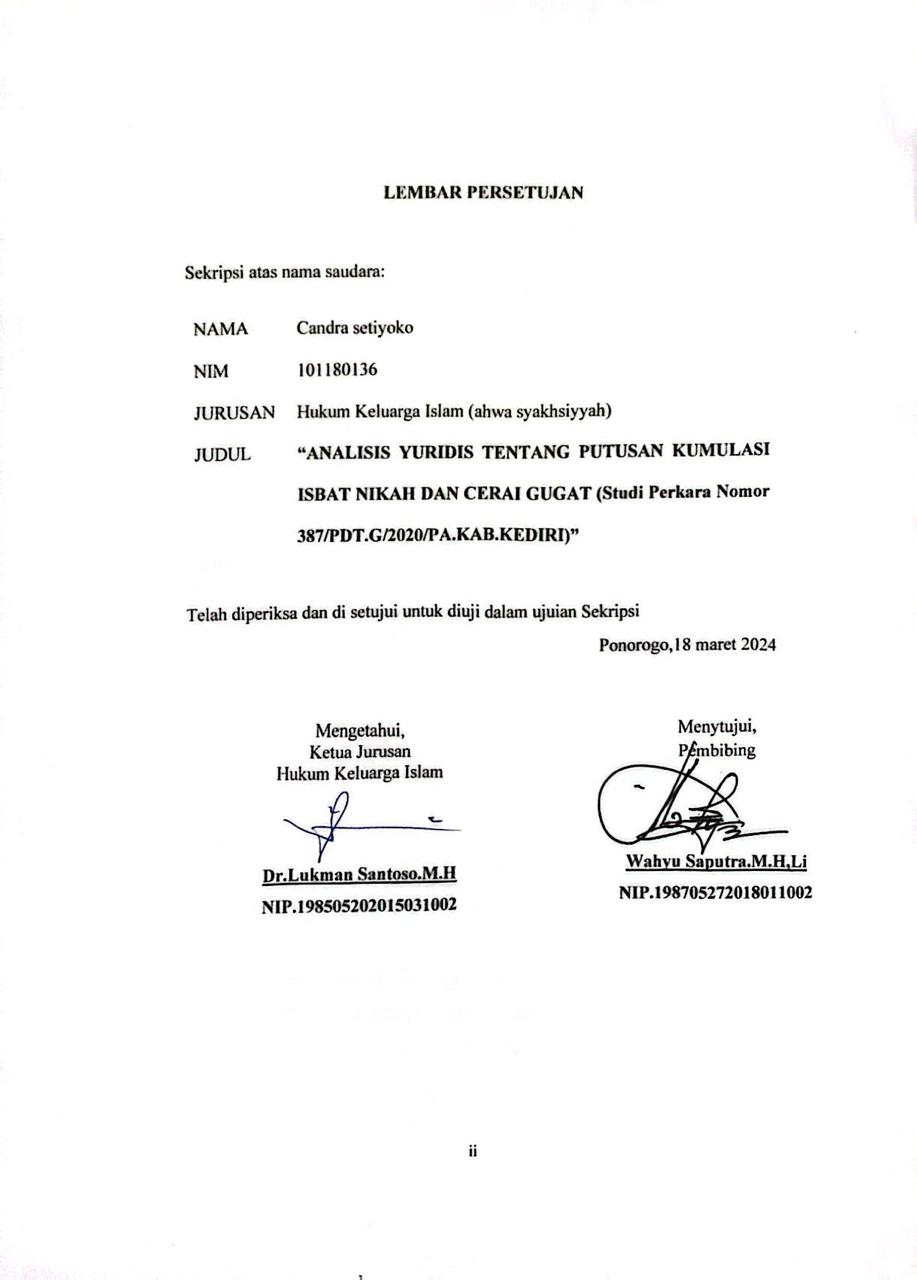
**Kata Kunci**: kumulasi isbat nikah untuk keperluan cerai gugat

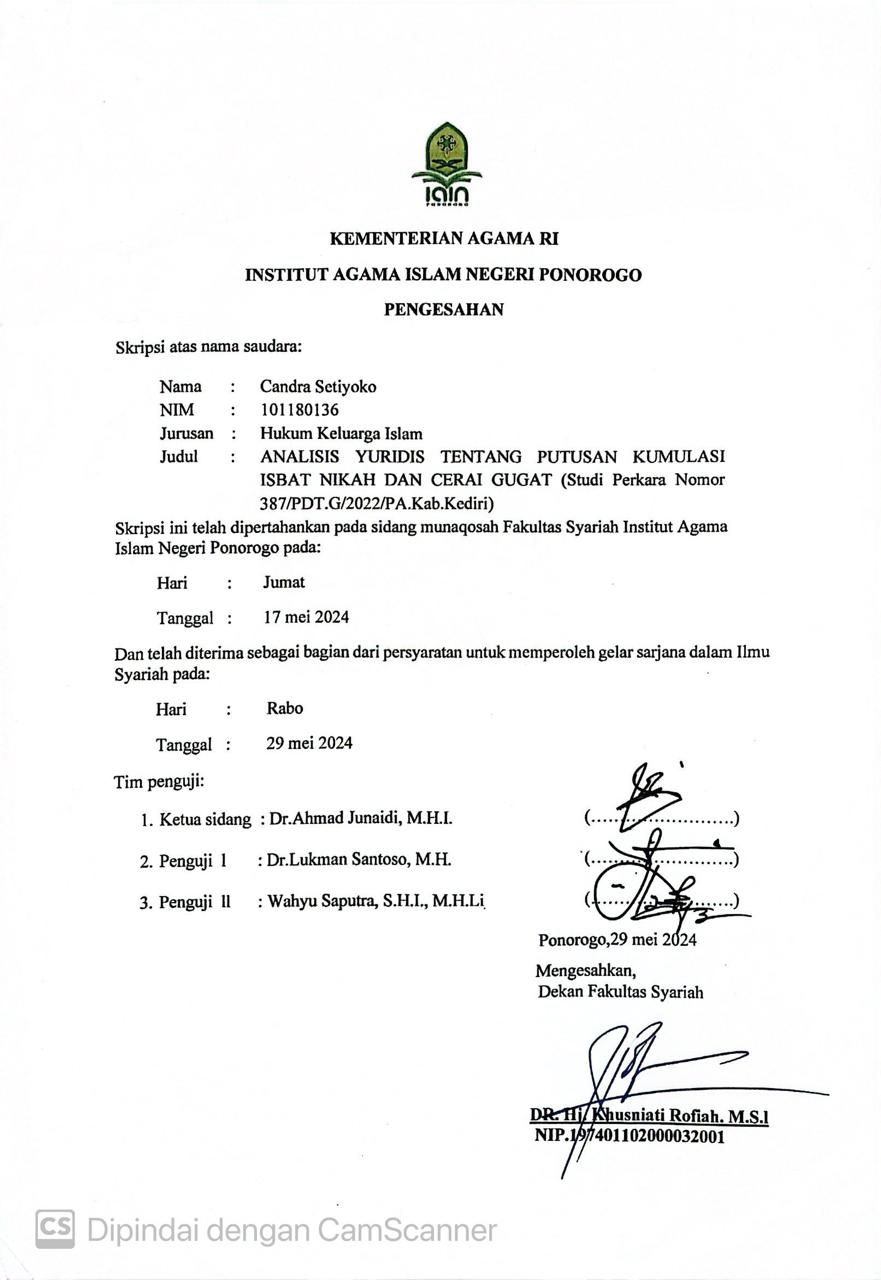
Penelitian ini berawal dari kasus dikabulkannya permohonan itsbat nikah pernikahan siri oleh majelis hakim Pengadilan Agama kabupten kediri dalam Putusan Nomor: 387/Pdt.G/Pa.Kab.Kediri Berdasarkan pertimbangan hakim, perkawinan Pemohon adalah sah meskipun menggunakan tokoh agama sebagai wali nikah. Dasar hukum hakim adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Padahal dalam hukum Islam mensyaratkan adanya wali nikah yaitu keluarga yang masih ada urutan hubungan nasab atau PPN yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah.

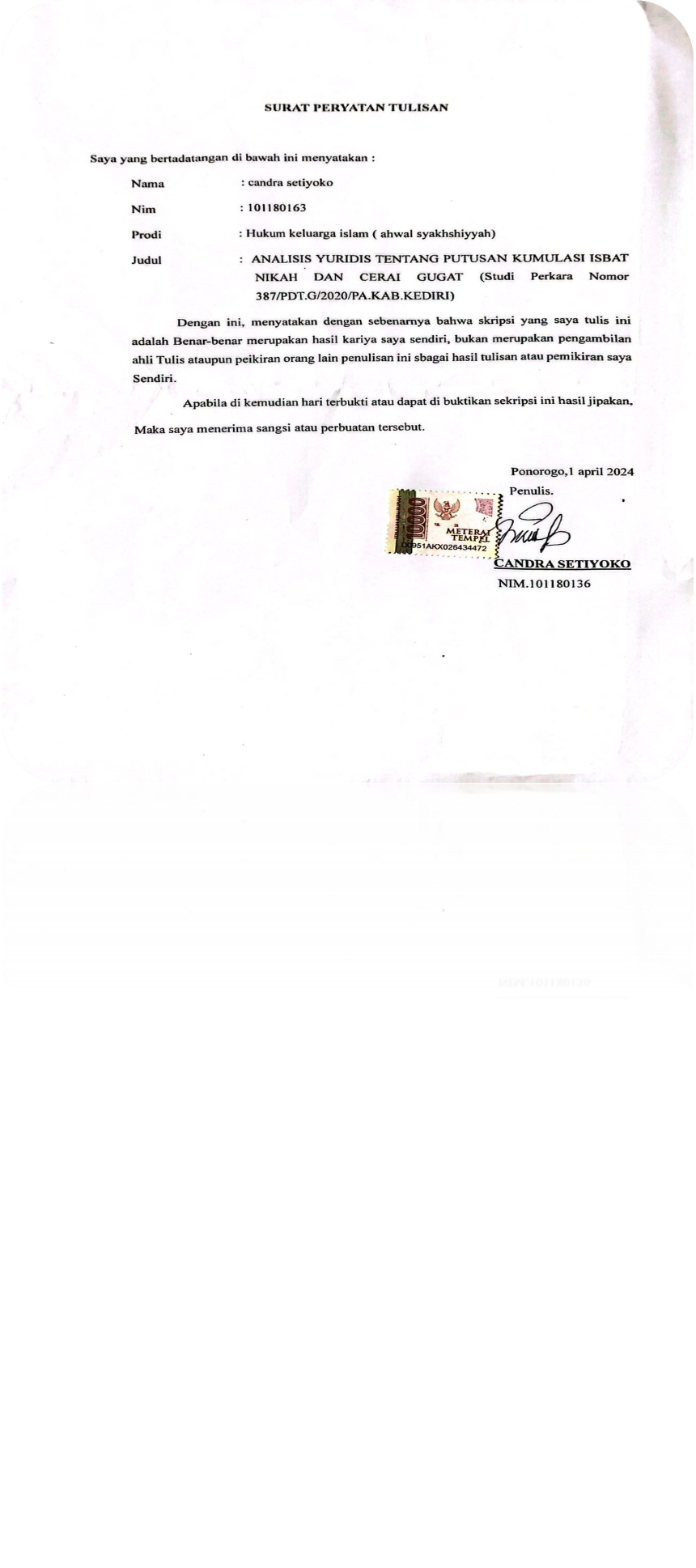
Berdasarkan penelitian tersebut,peneliti tertarik untuk mengkaji antara lain:pertama .bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam Perkar kumulasi Nomor: 387/Pdt.G/PA.Kab.Kediri/2022 dalam menetapkan isbat nikah untuk keperluan cerai guga? Kedua Bagaimana analisis yuridis terhadap dampak hukum yang ditimbulkan dari putusan isbat nikah dan cerai gugat perkara Nomor: 387/pdt/G/PA.Kab.Kediri/2022 untuk keperluan cerai gugat?

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang termasuk studi kepustakaan (library research). Sedangkan untuksumber data primer penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama kabupaten kediri perkara nomor:387/pdt/G/2022. Peneliti ini dalam menganalisis data menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola berfikir deduktif dan teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi.

Dari kedua rumusan masalah di atas, setelah dilakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa paradigma yang di anut oleh hakim dalam memutus perkara adalah paradigma positivistic. Implikasinya, kepatuhan terhadap hukum positif dianggap adil, sebaliknya pelanggarannya dianggap tidak adil. Pertimbangan hakim telah sesuai dengan konsep Gustav Radbruch, karena pertama keadilan untuk Pemohon telah terealisasikan, kedua kemanfaatan untuk mengurus akta kelahiran anak dan ketiga kepastian hukum sehingga status pernikahannya dapat dicatatkan di KUA dan status anak jelas nasabnya.

****

****

****

**SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Candra Setiyoko

NIM : 101180136

Fakultas : Syariah

Progam studi : Hukum Keluarga islam

Judul sekripsi/tesis : ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN KUMULASI

ISBAT NIKAH DAN CERAI GUGAT (studi perkara Nomor

387/pdt.g/2022/PA.Kab.Kediri).

Menyatakan bahwa naskah skripsi /tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembibing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakan IAIN ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id.** adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut,sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian peryataan saya dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo 4,juni 2024

 Penulis

Candra setiyoko

**MOTTO**

**لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَاۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَأْنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖۚ وَاعْفُ عَنَّاۗ وَاغْفِرْ لَنَاۗ وَارْحَمْنَاۗ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَࣖ ۝٢**

artinya:

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir.”.[[1]](#footnote-2) (Q.S.al-baqarah ayat-286)

iii

**KATA PENGANTAR**

Dengan penuh kekhusyukan, penulis mengucapkan segala puji dan syukur kepada Allah SWT Sang Maha Pencipta, Yang Maha Mengetahui, atas segala rahmat dan hidayat-Nya yang tak terhingga. Penulis menyadari bahwa hanya dengan limpahan kasih dan petunjuk-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi berjudul "analisis yuridis tentang putusa kumulasi isbat nikah untuk keperluan cerai gugat (Studi Perkara Nomor 387/Pdt.G/Pa.Kab.Kediri) " ini dengan baik meskipun belum sempurna**.**

Dalam sekripsi ini mejelaskan mengenai isbat nikah yang di kumulasikan/pegabungan dengan cerai gugat dua tuntutan dalam satu permohonan di mana masarakat belum banyak mengerti dampak dan resiko kedepanya akibat pernikahan siri yang tidak tercatatkan di KUA.maka dari itu penulis ingin memberi gambara bagi masarakat dengan megunakan putusan pengadilan agama (Studi Perkara Nomor 387/Pdt.G/Pa.Kab.Kediri) supaya lebih mengetahui dampak dan resiko dari pernikahan siri tersebut.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

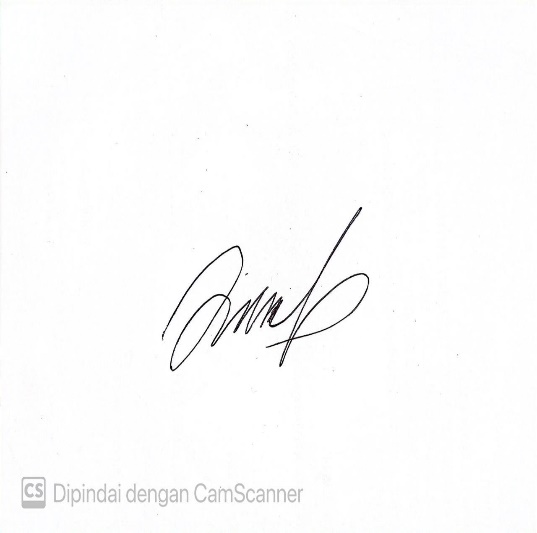
1. Prof. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., selaku Rektor IAIN Ponorogo yang telah mem-berikan kesempatan penulis menimba ilmu di almamater tercinta.

v

1. Dr. Hj khusniati Rofiah, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang telah membantu melancarkan proses pendidikan selama di Fakultas Syariah hingga menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. Lukman Santoso.M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Is-lam yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Wahyu Saputra, M.H.I., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Ibu dosen dan segenap civitas akademika IAIN Ponorogo yang te-lah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberian kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah semoga skripsi ini ber-manfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Aamin.

Ponorogo,18 maret 2024

Candra setiyoko

101180136

**PERSEMBAHAN**

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna inamun besar harapan semoga dapat memberikan manfaat untuk pembaca guna menambah keilmuan.Peneliti ini dipersembahkan untuk orang-orang yang selalu mendoakan, menemani, membimbing, membiayai, memotivasi,serta membantu kelancaran peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini, yakni kepada:

1. Kedua orang tua saya, ibu Kasemi dan bapak Kardi. orang yang paling setia menghadapi baik buruk mood peneliti, selalu berdoa dan berikhtiar untuk kebahagiaan dan kesukesan peneliti. Beliau berdua yang telah memberikan dukungan yang begitu luar biasa yang tidak bisa hanya dibalas sekedar dengan selembar kertas di persembahan ini. Semoga ini menjadi langkah awal bagi saya untuk memberikan yang terbaik kepada Ibu dan Bapak, Aamiin Aamiin Ya Rabb.
2. Untuk kaka kandung dan keluarga besar yang telah memberikan support, dan do’a untuk penulis dalam bertholabul ilmi setinggi-tingginya agar memiliki akhlak dan ilmu yang bermanfaat khususnya bagi keluarga.
3. Untuk Bapak Drs.Munasik M.H. Selaku Hakim di tempat penulis PKL yakni di Pengadilan Agama kabupaten kediri yang telah memberi dukungan, motivasi, dan membantu penulis memahami isi putusan yang sedang penulis teliti dan diskusi seputar topik pembahasan.
4. Untuk untuk semua teman -teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang senantiasa mensupport,menghibur, memberikan banyak pengalaman dan ilmunya.

viii

**PEDOMAN TRANSLITRASI**

Translitasi digunakan ketika peneliti melakukan pengubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Berikut adalah pedoman baku untuk translitasi dari huruf Arab ke huruf Latin:

1. Pedoman translitasi yang digunakan adalah:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Arab** | **Ind.** | **Arab** | **Ind.** | **Arab** | **Ind.** | **Arab** | **Ind.** |
| ء | , | د | D | ض | d} | ك | k |
| ب | B | ذ | Dh | ط | t | ل | l |
| ت | T | ر | R | ظ | z} | م | m |
| ث | Th | ز | Z | ع | ‘ | ن | n |
| ج | J | س | S | غ | gh | ه | h |
| ح | h} | ش | Sh | ف | f | و | w |
| خ | Kh | ص | Ṣ | ق | q | ي | y |

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf a>, i> dan u>.

3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditranslitasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw”.

Contoh:

*Bayna, ‘layhinm, qawl, mawdu>’ah*

x

4. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum teresap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam translitasi.

Translitasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh:

*Ibn Taymi>yah bukan Ibnu Taymi>yah. Inna al-di>n ‘inda Allah al-Isla>m bukan Inna al-di>na Alla>hi al-Isla>mu. … Fahuwa wa>jib bukan fahuwa wa>jibu dan bukan pula fahuwa wa>jibun.*

6. Kata yang berakhir dengan ta>’marbu>tah dan berkedudukan sebagai sifat

(*na’at*) dan ida>fah ditranslitasikan dengan “ah”.

Sedangkan *muda>f* ditranslitasikan dengan “at”.

Contoh:

*Na’at dan Mud{a>f ilayh : Sunnah sayyi’ah, al-Maktabah al-Mis}riyah. Mud}a>f : mat}ba’at al-‘A<mmah.*

7. Kata yang berakhir dengan *ya>* mushaddah (ya>ber-*tashdid*) ditranslitasikan dengan *i*>. Jika *i*>diikuti dengan *ta>’marbu>t}ah* maka translitasinya adalah *i>yah*, Jika*ya>*’ ber-*tashdid* berada di tengah kata ditranslitasikan dengan *ya>* .

Contoh:

Al-Ghaza>li, al-Nawawi>

Ibn Taymi>ah.Al-Jawzi>yah.

Sayyid, mu’ayyid, muqayyid.

xi

**DAFTAR ISI**

|  |  |
| --- | --- |
| Halaman Judul ………………………………………………………… | ii |
| Lembar Persetujuan ……………………………………………………. | iii |
| Lembar Pengesahan ……………………………………………………. | iv |
| Lembar Keaslian Tulisan ………………………………………………. | v |
| Motto …………………………………………………………………... | vi |
| Halaman Persembahan ………………………………………………… | vii |
| Abstrak ………………………………………………………………… | viii |
| Kata Pengantar …………………………………………………………. | ix |
| Pedoman Translitasi …………………………………………………… | ix |
| Daftar Isi………………………………………………………………... | xi |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BAB** | **I** | **PENDAHULUAN** |  |
|  |  | 1. Latar Belakang Masalah ……………………………... | 1 |
|  |  | 1. Rumusan Masalah ……………………………………. | 5 |
|  |  | 1. Tujuan Penelitian …………………………………….. | 5 |
|  |  | 1. Manfaat Penelitian …………………………………… | 6 |
|  |  | 1. Telaah Pustaka ………………………………….......... | 7 |
|  |  | 1. Metode Penelitian ……....………………….………… | 10 |
|  |  | 1. Jenis Penelitian ……...........................…………... | 10 |
|  |  | 1. Pendekatan Penelitian ………………..…………. | 11 |
|  |  | 1. Sifat Penelitian …...…...………………………… | 11 |
|  |  | 1. Subyek Penelitian ……….......………………….. | 11 |
|  |  | 1. Data dan Sumber Data...... ……………………… | 12 |
|  |  | 1. Teknik Pengumpulan Data ...………………….… | 13 |
|  |  | 1. Analisis Data …........................………………… | 15 |
|  |  | 1. Sistematika Pembahasan …....…………………... | 16 |
|  |  |  |  |
| **BAB** | **II** | **KAJIAN TEORI** |  |
|  |  | 1. Kumulasi ……………....................…………………. | 17 |
|  |  | 1. Isbat Nikah ………………………………………....... | 25 |
|  |  | 1. Perceraian ……………………..................................... | 29 |
|  |  | 1. Pertimbangan Majlis Hakim dalam memutus perkara…...................................................................... | 32 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **BAB** | **III** | **Hasil dan Pembahasan** |  |
|  |  | 1. Gambaran Umum Pengadilan Kediri……………………………................................ | 35 |
|  |  | 1. Diskripsi Putusan Perkara ………………………....... | 40 |
|  |  | 1. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Kumulasi ………………………................... | 56 |
|  |  | 1. Dampak hukum yang ditimbulkan ……………….... | 62 |
|  |  |  |  |
| **BAB** | **IV** | **Penutup** |  |
|  |  | 1. Kesimpulan ………………………………….... | 66 |
|  |  | 1. Saran …………………………………………… | 68 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **DAFTAR PUSTAKA** ……………………………………………….. | | | 69 |
| **LAMPIRAN-LAMPIRAN** …………………………………………. | | |  |

xii

xiii

**BAB l**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Pernikahan adalah istilah yang diambil dari bahasa arab dari kata *nakaha* atau *zawaj* yang artinya adalah perkawinan.[[2]](#footnote-3) Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang sempurna, karena setiap manusia memiliki kodrat berpasang-pasangan yang merupakan salah satu sunnah atas seluruh makhluk-Nya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zariat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

"*Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah*)".

Alquran surat An-Nur ayat 32 memerintahkan agar menikah dengan tujuan membangun rumah tangga yang harmonis, dan dengan ikatan yang kokoh melalui akad atau ijab qobul perkawinan.[[3]](#footnote-4)

"*Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui*"

1

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[[4]](#footnote-5) Hal ini berarti bahwa pernikahan itu berlangsung seumur hidup, cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir dan suami istri membantu untuk mengembangkan diri.[[5]](#footnote-6) Dalam pasal 2 bab II kitab I Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidza* untuk menjalakan hukum syariat demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.[[6]](#footnote-7)

Perkawinan dikatakan perbuatan hukum yang sah, apabila memenuhi unsur tata cara agama dan tata cara pencatatan nikah dan diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No 1 Tahun 1974. Kedua unsur tersebut mengandung artian bahwa perkawinan selain memenuhi syariat juga harus dicatat petugas pencatat nikah. Maka ketika suatu perkawinan yang hanya dilaksanakan sampai batas pasal 2 ayat (1) akibat hukumnya adalah ketika terjadi persengketaan antara suami isteri maka tidak bisa meminta perlindungan hak dan hukum, karena perkawinan tersebut tidak tercatatkan di administrasi negara. Atas problematika tersebut, itsbat nikah sangat diperlukan untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan.

Hukum acara di Pengadilan Agama diatur oleh UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang kemudian diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989. Pengadilan Agama menjadi tempat bagi para pencari keadilan, khususnya bagi setiap orang Islam untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan masalah perdata Islam.[[7]](#footnote-8)

Perkara isbat nikah dan cerai gugat sesuai dengan ketentuan pasal 86 UU Ayat (1) No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. UU No.1 Tahun 1974 mengatur berbagai ketentuan hukum materiil perkawinan dan segala sesuatu yang terkait dengannya, sedangkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 mengatur tentang tata cara perkawinan dan sekaligus merupakan pelaksanaan UU Perkawinan. Dan ketentuan hukum lain bagi orang yang beragama Islam, terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No. 7 Tahun 1989.

Dalam konteks ini menark mencermati sebuah kasus yang terjadi di pengadiln agama kabupaten kediri Bahwa, bermula antara Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) telah menjalin hubungan dan melakukan nikah menurut Agama Islam namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama. setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah kontrakan 3 tahun, kemudian pindah rumah bersama. Telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak akan tetapi kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai tersebut tidak berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hinga tergugat melalikan tugas sebagai seorang suami tidak ada perhatian dan lepas tanggung jawab terhadapkeuangan keluarga, dengan tidak pernah memberikan nafkah ± 2 (dua) tahun lebih kepada Penggugat, sehingga kebutuhan keluarga dari hasil kerja Penggugat.Demi masa depan keluarga, Penggugat meminta kepastian hukum mengenai status pernikahan dengan Tergugat untuk dicatatkan secara resmi, namun oleh Tergugat tidak segera dilaksanakan dan diberikanjanji-janji yang tidak ada kepastian hingga sekarang. puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Agustus 2021 menyebabkan Penggugat meninggalkan rumah bersama sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama ± 5 bulan serta Tergugat sudah mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami. Sehinga sang istri /pegugat mengajugan permohonan isbat nikah dan cerai gugat di pengadilan agama kbupeten kediri.

Problem yang menarik yang perlu dicermati di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah tentang penggabungan antara itsbat nikah dengan perceraian (cerai gugat). Penggabungan perkara atau kumulasi istilah hukumnya *samenvoeging van vordering* adalah penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum kedalam satu gugatan atau beberapa gugatan digabungkan menjadi satu. Pada dasarnya setiap gugatan yang digabungkan merupakan gugatan yang berdiri sendiri, penggabungan gugatan hanya diperkenankan dalam batas-batas tertentu.

Bedasarkan ketentuan yang termaktub dalam pasal 7 (ayat 3) huruf (a) KHI,

perkawinan yang dapat disahkan dan dikabulkan perceraiannya ialah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang memang tidak memiliki halangan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dari latar belakang tersebut, maka penulis bermaksud mengangkat fenomena yang sudah ada menjadi sebuah penelitian yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN KUMULASI ISBAT NIKAH UNTUK KEPERLUAN CERAI GUGAT (Studi Perkara Nomor 387/Pdt.G/Pa.Kab.Kdr)**

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam Perkar kumulasi Nomor: 387/Pdt.G/PA.Kab.Kediri/2022 dalam menetapkan isbat nikah untuk keperluan cerai gugat?
3. Bagaimana analisis yuridis terhadap dampak hukum yang ditimbulkan dari putusan isbat nikah dan cerai gugat perkara Nomor: 387/pdt/G/PA.Kab.Kediri/2022 untuk keperluan cerai gugat?
4. **Tujuan Penelitian**
5. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Perkara Nomor: 387/Pdt.G/PA.Kab.Kediri/2022 dalam menetapkan isbat nikah untuk keperluan cerai gugat.
6. Untuk menganalisis yuridis terhadap dampak hukum yang ditimbulkan dari putusan isbat nikah perkara Nomor: 387/pdt/G/PA.Kab.Kediri/2022 untuk keperluan cerai gugat.
7. **Manfaat Penelitian**
8. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sebagai upaya pengembangan ilmu hukum acara perdata terkait masalah perkawinan sehingga dapat digunakan sebagai referensi oleh peneliti-peneliti berikutnya khususnya yang berhubungan tentang itsbat nikah dan cerai gugat.

1. Manfaat praktis
2. Melalui penelitian ini, kami berupaya untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang konsekuensi hukum dan sosial dari menikah siri, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mematuhi prosedur hukum yang berlaku dalam proses pernikahan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat menjadi instrumen penting dalam upaya pencegahan praktik menikah siri dan mempromosikan kesadaran akan pentingnya menjalani pernikahan dengan proses yang sah dan sahih.
3. **Telaah Pustaka**

Untuk melengkapi tujuan pengajuan penelitian, maka kami menggunakan karya ilmiah terdahulu tentang analisis putusan isbat nikah. Telaah pustaka digunakan untuk menegaskan bahwa kajian penelitian ini sama sekali bukan pengulangan atau duplikasi dari penelitian sebelumnya, diantaranya:

*Pertama*, Penelitian ilmiah karya Zuni Ayu Pratiwi, berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Itsbat Nikah Karena Pernikahan Siri Oleh Wali Muhakkam Dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No. 0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl".* Dalam skripsi ini ada dua rumusan masalah yaitu bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bangkalan No. 0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl dalam penetapan itsbat nikah karena pernikahan siri dan Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim tentang wali Muhakkam dalam penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No.0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl.

Penelitian ilmiah Zuni bertitik fokus tentang permohonan itsbat nikah karena pernikahan siri menggunakan wali muhakkam yang dikabulkan oleh hakim serta pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Bangkalan. Kemudian dianalisis dengan kesimpulan bahwa, menurut hukum positif di Indonesia *pertama*, pertimbangan hakim yang menerima permohonan itsbat nikah pernikahan siri ini sudah benar, bahwa permohonan pemohon telah sesuai dengan pasa 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e KHI, selain itu syarat dan rukun dalam pernikahan tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. *Kedua*, Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bangkalan mengenai wali muhakkam menurut hukum positif tidak tepat karena yang dimaksud wali dalam Pasal 23 KHI adalah wali hakim.[[8]](#footnote-9)

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yakni mengacu tentang analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan itsbat nikah ditinjau dari teori interpretasi hakim dalam menetapkan putusan. Produk hukum dalam penelitian ini mengacu pada penetapan dan berlanjut pada putusan cerai gugai.

*Kedua*, penelitian ilmiah karya Nur Halimah berjudul, *“Wali Nikah Menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i”.*Dalam skripsi terdapat dua rumusan masalah yaitu, Bagaimana persyaratan wali nikah menurut Imam Malik dan Imam Syafi‟i dan Bagaimana konsep wali nasab menurut Imam Malik dan Imam Syafi‟i.

Penelitian Nur Halimah fokus pada wali nikah yang bahwasanya menurut kedua Imam tersebut nikah tanpa wali tidak sah karena wali termasuk dalam rukun sah nikah. Pembagian wali nasab dari kedua Imam tersebut sama yaitu wali mujbir dan ghairu mujbir. Imam Malik berpendapat dalam memilih wali itu harus runtut. Sedangkan menurut Imam Syafi‟i ketika tidak ada wali nasab boleh berpindah ke wali lainnya dengan runtut yang sudah diatur syara.[[9]](#footnote-10)

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, maka dapat diketahui bahwa skripsi ini menjelaskan tentang analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan itsbat nikah ditinjau dari teori yurisprudensi interpretasi hakim. Sedangkan penelitian sebelumnya menjelaskan konsep wali nikah menurut Imam Malik dan Imam Syafi‟i. Bahan penelitian dalam skripsi ini adalah penetapan dan berlanjut putusan pengadilan sedangkan penelitian sebelumnya adalah perbandingan mahzab.

*Ketiga,* penelitian ilmiah karya Muhammad Bima Setiawan yang berjudul "*Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Tentang Itsbat Nikah Pernikahan Siri* (Studi Perkara Nomor: 388/Pdt. G/2020/PA. Po)". Dalam skripsi terdapat dua rumusan masalah yaitu Bagaimana analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan itsbat nikah dan Bagaimana tinjauan teori interpretasi hukum terhadap dasar hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor:388/Pdt. G/2020/PA. Po.

Penelitian Muhammad Bima fokus pada teori interpretasi hukum, sehingga paradigma yang di anut oleh hakim dalam memutus perkara adalah paradigma positivistic. Implikasinya, kepatuhan terhadap hukum positif dianggap adil, sebaliknya pelanggarannya dianggap tidak adil. Pertimbangan hakim telah sesuai dengan konsep *Gustav Radbruch*, karena *pertama* keadilan untuk Pemohon telah terealisasikan*, kedua* kemanfaatan untuk mengurus akta kelahiran anak dan *ketiga* kepastian hukum sehingga status pernikahannya dapat dicatatkan di KUA dan status anak jelas nasabnya. Majelis hakim dalam penetapan perkara ini menggunakan metode interpretasi sistematis yang mengaitkan peraturan satu dengan lainnya dan interpretasi gramatikal sebagai penalaran hukum dalam memeriksa apakah dalam perkawinan tersebut ada atau tidaknya larangan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[[10]](#footnote-11)Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, maka dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan yakni dalam penetapan hukum dimana dalam penelitian sebelumnya diperuntukkan untuk keperluan akta anak. Sedang skripsi ini penetapan hukumnya untuk keperluan cerai gugat.

1. **Metode Penelitian** 
   1. **Jenis Penelitian**

Penelitian hukum normatif dalam hukum islam dimaksudkan untuk menggali,menemukan dan mengembangkan hukum terkait dengan problem-problem keumatan yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman.[[11]](#footnote-12) Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sehingga penelitian normatif ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier) atau studi dokumen. Bahan hukum tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, dan ditarik kesimpulan yang berhubungan dengan msalah yang diteliti.[[12]](#footnote-13) Pentingnya peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena yang akan diteliti adalah dokumen resmi dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

* 1. **Pendekatan penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta normanorma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yuridis normatif yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan tentang kumulasi isbat nikah untuk keperluan cerai gugat (studi perkara nomor 387/pdt.G/pa.kab.kediri).

* 1. **Sifat penelitian**

Sedangkan sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif-analitis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian, demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian . Fakta yang menjadi objek disini adalah tentang putusan hakim dalam perkara kumulasi isbat nikah untuk keperluan cerai gugat (studi perkara nomor 387/pdt.G/pa.kab.kediri).

* 1. **Subyek penelitian**

Subyek mengacu kepada sesuatu atau seseorang tempat kita memperoleh data, fenomena atau keterangan .Jadi yang menjadi subyek dalam penelitian ini (yang mempunyai sifat/karakteristik/sesuai dengan keadaan yang diteliti), atau si kepala yang dimaksud disini adalah para Hakim yang menangani masalah tersebut, dan subyek penelitian yang dimaksud disini adalah sesuatu yang bisa untuk diperbincangkan, didiskusikan, dikaji dan juga bisa diteliti tentunya.

* 1. **Data dan Sumber Data**

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor Nomor: 387/Pdt.G/Pa.Kab.Kediri yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama kabupaten kediri tanggal 22 Februari 2022.Sumber data utama dalam penetian ini diambil dari data-data kepustakaan yang dalam penelitian hukum normatif mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[[13]](#footnote-14)
2. Bahan Hukum Primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan.[[14]](#footnote-15) Salah satunya yaitu penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 387/Pdt.G/Pa.Kab.Kdr. Selain itu terdapat pula beberapa bahan hukum primer lainnya, diantaranya:

* Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
* Kompilasi Hukum Islam.
* Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang wali hakim
* Alquran dan Hadis.
* Sumber-sumber lain antara lain Buku, Jurnal, maupun karya tulis ilmiah lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

1. Bahan Hukum Sekunder dikaitkan penelitian terhadap penetapan Pengadilan Agama Ponorogoperkara No. 388/Pdt.G/2020/PA.Po., bahan hukum sekunder yang berupa buku hukum mempunyai posisi yang strategis, karena dalam buku hukum ditemukan pemikiran para filsuf hukum yang kemudian pemikirannya itu beberapa diantaranya berkembang secara lebih spesifik menjadi teori hukum.[[15]](#footnote-16)
   1. **Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah teknik dokumentasi, yaitu mempelajari kasus dengan menghimpun data melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis.[[16]](#footnote-17) Pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisa atas dokumen resmi berupa penetapan Pengadilan Agama (studi perkara nomor 387/pdt.G/pa.kab.kediri)

1. **wawancar**

Wawancara adalah proses percakapan yang dilakukan oleh interviewer dan interviewee dengan tujuan tertentu, dengan pedoman, dan bisa bertatap muka maupun melalui alat komunikasi tertentu.[[17]](#footnote-18)Orang yang mengajukan pertanyaan dalam proses wawancara disebut pewawancara (interviewer) dan pemberi informasi yang menjawab pertanyaan disebut informan atau responden. Tujuan peneliti akan mewawancarai hakim salah satu hakim yang bernama Drs.munasik,M.H.beliyau adalah orang yang menagani kasus isbatnikah dan cerai gugat di Pengadilan Agama kab.kediri.

1. **Dokoumentasi**

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, maupun hasil putusan/penetapan. Dengan teknik dokumentasi ini peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari narasumber tetapi memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis lainnya atau dari dokumen yang ada pada informan. Pada penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berupa dokumen berupa berkas perkara.

1. **Metode observasi**

Observasi adalah pengamatan, perhatian, atau pengawasan. Metode pengumpulan data observasi artinya pengumpulan data atau menjaring data dengan melakukan pengamatan terhadap subyek dan atau obyek penelitian secara seksama (cermat dan teliti) dan sistematis. Melakukan observasi dalam pengumpulan data bukanlah pekerjaan yang mudah. Unsur ketekunan, kesungguhan dan kecermatan sangat diperlukan, agar data yang diperoleh dapat lebih mudah dipertanggungjawabkan keshahihannya. Metode observasi yang digunakan peneliti adalah metode observasi partisipan. Observasi partisipan adalah observasi dimana observer atau peneliti mengikuti dan menjalankan pekerjaan seperti subyek atau kelompok yang sedang diamat.**[[18]](#footnote-19)**

* 1. **Analisis** **Data**

Teknik deskriptif, yaitu peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Dalam mendeskripsikan itu dikemukakan apa adanya tanpa disertai tanggapan atau pendapat pribadi peneliti. Dalam hal ini dengan mengemukakan kasus yang terdapat di Pengadilan AgamaPonorogo tentang Isbat nikah ditolak karena menikah sirri menggunakan wali muhakkam, kemudian dikutip apa adanya tanpa diberi komentar oleh peneliti yang bersifat solutif.[[19]](#footnote-20)

Pola pikir deduktif, yaitu metode berfikir yang diawali dengan mengemukakan teori-teori bersifat umum yang berkenaan dengan hukum perkawinan, perkara isbat nikah, cerai gugat dan aturan perundang-undangan, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset produk hukum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

* 1. **Sistematika Pembahasan**

Laporan hasil penelitian disusun menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Untuk memudahkan penyelesaian skipsi yang fokus, terarah, dan sistematis, maka peneliti mengklasifikasi garis besar materi dengan empat bab pembahasan. Sistematika dan pembahasan penelitian sebagai berikut:

Bab I pendahuluan**,** berisi latar tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II teori, berisi tentang tinjauan umum isbat nikah, prosedur pelaksanaan, sebab-akibat hukum, perundang-undangan yang berlaku, wewenang Pengadilan Agama, dan yurisprudensi interpretasi hukum.

Bab III hasil penelitian, berisi tentang Deskripsi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan analisis terhadap dasar pertimbanga hakim dalam penetapan Nomor: Nomor: 387/Pdt.G/Pa.Kab.Kdr.

Bab IV penutup, berisi kesimpulan dari seluruh uraian mulai bab terdahulu serta saran terhadap jalan keluar pada pokok permasalahan

**BAB ll**

**KAJIAN TEORI**

1. **Kumulasi (Penggabungan Gugatan)**
2. Pengertian kumulasi

Dalam pengertian istilah, "kumulasi" merujuk pada tindakan penyatuan, timbunan, atau penggabungan, sementara "akumulasi" mengacu pada proses pengumpulan, penimbunan, atau penghimpunan.**[[20]](#footnote-21)** Kumulasi gugatan, atau dalam bahasa Belanda disebut "samenvoeging van vordering," adalah proses penggabungan beberapa tuntutan hukum ke dalam satu gugatan.[[21]](#footnote-22) Kumulasi gugatan, atau dalam bahasa Belanda disebut "*samenvoeging van vordering,*" merupakan tindakan menggabungkan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan atau menggabungkan beberapa gugatan menjadi satu.

Regulasi terkait penggabungan gugatan ini diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bersama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.[[22]](#footnote-23)kumulasi yamg di maksut disin adalah cerai gugat dan pengesahan perkawinan siiri.

17

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, perbedaan makna antara kumulasi dan akumulasi terletak pada pengertian masing-masing; kumulasi merujuk pada penggabungan, sementara akumulasi mengacu pada pengumpulan. Namun, istilah yang lebih umum digunakan adalah kumulasi.

Hukum acara perdata yang berlaku, termasuk dalam HIR, R.Bg., dan Rv, tidak memberikan regulasi terkait kumulasi gugatan. Satu-satunya undang-undang yang mengatur kumulasi gugatan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah satu-satunya regulasi yang mengatur kumulasi gugatan. Bahkan, Pasal 86 dalam undang-undang ini sudah menjadi hal yang umum diketahui oleh para hakim, terutama hakim di Pengadilan Agama, dalam penyelesaian masalah kumulasi gugatan. Penggabungan suatu gugatan bertujuan untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Melalui penggabungan gugatan, diharapkan dapat menghemat waktu dan biaya yang diperlukan dalam proses peradilan.

Pada dasarnya, setiap gugatan harus diajukan secara independen, di mana setiap gugatan disampaikan melalui surat gugatan terpisah, diperiksa, dan diputuskan secara terpisah. Namun, dalam batas-batas tertentu, penggabungan gugatan diperbolehkan asalkan terdapat hubungan atau koneksi yang kuat antara satu gugatan dengan gugatan lainnya. Menurut Pasal 86 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa gugatan terkait penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian atau setelah putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dikeluarkan.[[23]](#footnote-24)

Dalam kalimat tersebut terdapat frase "dapat diajukan secara bersama-sama," yang bisa menjadi pertimbangan bagi hakim untuk menolak penggabungan gugatan. Kata "dapat" di sini mengindikasikan bahwa penggabungan tidak bersifat wajib, sehingga hakim memiliki kewenangan untuk menolak penggabungan tersebut. Secara dasar, penggabungan gugatan tidak diatur secara rinci dalam HIR maupun RBg. Meskipun demikian, dalam praktiknya, penggabungan gugatan diterima dan diakui oleh yurisprudensi.

Sedangkan menurut Yahya Harahap, selain tidak diatur dalam HIR dan RBg, hukum positif juga tidak mengaturnya, begitu juga dengan Rv, tidak mengatur secara tegas dan tidak juga melarangnya. Adapun dalam pasal 103b Rv, larangan hanya terbatas pada penggabungan gugatan antara tuntutan hak menguasai (bezit) dengan tuntutan hak milik. Dapat disimpulkan bahwa *secara a contrario*, Rv membolehkan adanya penggabungan gugatan.[[24]](#footnote-25)

Salah satu keputusan dari Raad Justisie Jakarta pada tanggal 20 Juni 1939 mengizinkan penggabungan gugatan selama gugatan-gugatan tersebut memiliki kesinambungan yang erat (innerlijke doelmatigheid).[[25]](#footnote-26) Pendapat yang sama juga ditegaskan dalam Putusan MA No.575K/Pdt/1983 yang di dalamnya menjelaskan.[[26]](#footnote-27)Meskipun Pasal 393 ayat (1) HIR menyatakan bahwa hukum acara yang harus diperhatikan hanya HIR, namun untuk mencapai efisiensi proses (*process doelmatigheid*), dimungkinkan untuk menerapkan lembaga dan ketentuan acara yang berada di luar lingkup HIR, asalkan penerapannya untuk memudahkan proses pemeriksaan dan menghidari putusan yang saling bertentangan. Dengan alasan tersebut, diizinkan untuk melakukan penggabungan (*samenvoeging*) atau kumulasi baik yang bersifat objektif maupun subjektif, selama terdapat *innerlijke* samenhangen atau koneksi yang erat di antara mereka.

1. Bentuk-bentuk kumulasi gugatan (pegabungan gugatan )

Didalam peradilan pegabungan perkara terdiri dari empat bentuk:

1. Perbarengan.

Dalam konteks Pasal 21 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menekankan perlunya peradilan yang sederhana cepat,dan biaya ringan,penggabungan gugatan menjadi suatu solusi yang dapat mendukung tujuan tersebut.Dengan menggabungkan beberapa tuntutan dalam satu gugatan,proses peradilan diharapkan dapat berjalan lebih efisien dan efektif.Salah satu bentuk penggabungan gugatan adalah perbarengan. Model ini muncul ketika seorang penggugat memiliki beberapa tuntutan yang menuju pada suatu akibat hukum tunggal. Dengan kata lain,jika satu tuntutan telah terpenuhi, maka tuntutan lainnya secara otomatis juga terpenuhi[[27]](#footnote-28).

Contohnya dapat ditemukan dalam perkara seperti wali adhol, dispensasi kawin, dan izin kawin yang digabungkan dalam satu gugatan. Keputusan terhadap masing-masing perkara tersebut sangat terkait satu sama lain dan memiliki tujuan yang sama, yaitu terlaksananya akad perkawinan sesuai dengan permohonan yang diajukan.

1. Pegabungan subjektif

Penggabungan model ini dapat terjadi dalam situasi di mana terdapat lebih dari satu penggugat, seorang penggugat melawan lebih dari satu tergugat, atau beberapa tergugat melawan beberapa penggugat. Dalam penggabungan subjektif, diperlukan adanya keterkaitan erat mengenai masalah hukum yang dihadapi oleh penggugat dan tergugat.[[28]](#footnote-29)

1. Pengabunggan objektif

Pengggabungan objektif adalah penggugat yang mengajukan lebih dari satu tuntutan atau gugatan dalam satu perkara.[[29]](#footnote-30) Berbeda dengan penggabungan (kumulasi) subjektif yang mensyaratkan antara tuntutan terhadap beberapa tergugat harus ada hubungan yang erat satu sama lainnya,maka untuk mengajukan gugatan yang bersifat kumulasi objektif tidak disyaratkan bahwa tuntutan-tuntutan itu harus ada hubungan yang erat satusama lain.[[30]](#footnote-31)

1. Intervensi

Intervensi adalah situasi di mana pihak ketiga, atas keputusan sendiri, turut campur dalam sengketa yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat. Orang yang melakukan intervensi disebut sebagai pihak intervensi.[[31]](#footnote-32) Bentuk intervensi terdidiri tiga bagian yaitu

1. *Voeging* (menyertai), masuknya pihak ketiga atas kehendaknya sendiri untuk membantu salah satu pihak menghadapi pihak lawan. Dalam hal ini pihak ketiga bertindak sebagai penggugat atau tergugat.
2. *Vrijwaring* (penanggungan), pihak ketiga ditarik oleh tergugat dengan maksud agar ia menjadi penanggung bagi tergugat.
3. *Tussenkomst* (menengahi), pihak ketiga masuk dalam proses perkara yang sedang berjalan untuk membela kepentingannya sendiri.
4. Syarat formil kumulasi gugatan

Untuk mengajukan kumulasi objektif tidak disyaratkan tuntutan itu harus ada hubungannya yang erat satu sama lain.[[32]](#footnote-33) apabila kumulasai Tidak diperlukan syarat bahwa tuntutan-tuntutan tersebut harus saling terkait secara erat untuk dapat mengajukan kumulasi objektif.[[33]](#footnote-34)dalam hal tersebut Mengenai keterkaitan, terdapat perbedaan pendapat, namun ada kesepakatan untuk mengecualikan kebolehan penggabungan gugatan terkait dua hal berikut:

1. Gugatan yang digabungkan tunduk kepada acara yang berbeda. Jika gugatan-gugatan tersebut tunduk kepada hukum acara yang berbeda, penggabungan tidak dapat dilakukan. Sebagai contoh, dalam perkara pembatalan merk tidak dapat digabungkan dengan perkara perbuatan melawan hukum karena perkara pembatalan merk tunduk kepada hukum acara yang diatur dalam undang-undang merk yang tidak mengenal upaya banding. Sementara itu, perkara perbuatan melawan hukum tunduk kepada hukum acara biasa yang mengenal upaya banding. Karena adanya ketertundukan pada hukum acara yang berbeda, kumulasi antara keduanya tidak diizinkan.
2. Gugatan yang digabungkan harus tunduk kepada kompetensi absolut yang berbeda. Gugatan-gugatan yang dikumulasikan harus jatuh di bawah kewenangan absolut dari satu badan peradilan, sehingga tidak diizinkan menggabungkan beberapa gugatan yang masuk dalam kewenangan absolut badan peradilan yang berbeda. Sebagai contoh, perkara sengketa kewarisan bagi orang-orang yang beragama Islam harus masuk di bawah kewenangan absolut badan peradilan tertentu. Kewenangan peradilan agama tidak dapat digabungkan dengan perkara perbuatan melawan hukum yang menjadi kewenangan peradilan umum. Secara umum, setiap gugatan seharusnya berdiri sendiri.[[34]](#footnote-35) Penggabungan gugatan diperkenankan dalam batas-batas tertentu, bila hal tersebut sudah memenuhi syarat formil yang telah ditentukan maka gugatan tersebut di izinkan untuk di kumulasikan.
3. Tujuan kumulasi gugatan

Tujuan dari penerapan kumulasi gugatan adalah untuk menyederhanakan proses pemeriksaan di persidangan dan mencegah adanya putusan yang saling bertentangan. Upaya penyederhanaan ini bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih sederhana.[[35]](#footnote-36) Pendapat sejalan juga diungkapkan oleh Abdul Manan yang menyatakan bahwa dengan menggabungkan gugatan ini, prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terwujud.[[36]](#footnote-37)dari persektif tersebut penggabungan gugatan, maka beberapa gugatan dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan secara sekaligus sehingga prosesnya menjadi sederhana, biayanya menjadi lebih ringan, tidak banyak waktu dan tenaga yang dibutuhkan dan dapat menghindari putusan yang saling bertentanga.

Dalam konteks hukum atau peradilan, terdapat kebijakan untuk menggabungkan beberapa perkara ke dalam satu persidangan atau pengadilan untuk mempercepat proses hukum. Hal ini dapat disebut sebagai "parafasekan" atau "paraphrasekan" jika kita mengasumsikan bahwa itu adalah istilah yang benar.

1. **Isbat nikah**
2. Pengertian isbat nikah

*Isbat* nikah berasal dari kata "*isbat*" dan "nikah." Kata "*isba*t" berasal dari bahasa Arab, yaitu ( اثبات,) yang merupakan bentuk masdar dari kata ( اثبت ) dengan arti penetapan, penyungguhan, dan penentuan. Dalam konteks *isbat* nikah, mengisbatkan berarti menyungguhkan atau menentukan kebenaran sesuatu, khususnya terkait dengan pernikahan.[[37]](#footnote-38) Sedangkan kata nikah berasal dari bahasa arab *nika>hun* yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja ( نكح,) kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan yang artinya bersenggama atau bercampur. Menurut bahasa, kata nikah berarti bertindih dan memasukkan. Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan bertindih dan berkumpul. Dalam terminologi, nikah adalah suatu akad yang membawa dampak kebolehan bergaul antara seorang pria dan seorang wanita, di mana keduanya saling menolong satu sama lain dan menetapkan batas hak serta kewajiban di antara mereka.[[38]](#footnote-39)

Para ulama fiqh memiliki perbedaan pendapat terkait dengan nikah, namun secara umum dapat disimpulkan bahwa menurut fiqh, nikah merujuk pada akad nikah yang diatur oleh syariah. Dalam pandangan ini, seorang suami diperbolehkan memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri serta seluruh tubuhnya.[[39]](#footnote-40)

*Itsbat* nikah adalah tindakan hukum yang diajukan ke Pengadilan Agama guna menetapkan pernikahan yang telah dilangsungkan, namun tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Pasal 7 angka (1) dan (2) KHI disebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

1. Dasar hukum

Terkait dengan pencatatan perkawinan dalam agama Islam tidak terdapat aturan secara eksplisit baik Alquran maupun hadis**.** Agar sahnya hukum perkawinan baik agama maupun Negara, pencatatan perkawinan di Indonesia dilakukan berdasarkan *qiyas* dan *maslahah-mursalah*.

Berdasarkan hukum positif Indonesia, isbat nikah diatur dalam KUH Perdata Pasal 100-102, UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mulai berlaku sejak 1 Oktober 1975, serta muncul Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tertanggal 1 April 1975 dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada awalnya, kewenangan isbat nikah diperuntukkan bagi yang melakukan perkawinan siri sebelum diberlakukan UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974. Selanjutnya, kewenangan tersebut diperluas dengan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (2) dan (3).

1. Tujuan isbat nikah

Sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pasal 7 Kompilasi Hukum Islam adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah. Artinya dalam hal perkawinan bila tidak mendapatkan Akta Nikah, maka solusi yang dapat ditempuh yaitu dengan mengajukan permohonan isbat nikah.[[40]](#footnote-41) Seseorang yang mengajukan Akta Nikah bertujuan agar perkawinan yang telah dilaksanakan mendapatkan bukti autentik berupa kutipan akta nikah dan mendapat legalisasi baik secara yuridis formal maupun dikalangan masyarakat luas.Selain itu, untuk menghindari fitnah yang kapan saja terjadi dalam pergaulan sehari-hari di lingkungan masyarakat yang berdampak langsung pada pihak perempuan. Oleh karena itu, isbat nikah yang menjadi wewenang peradilan Agama merupakan solusi yang bijak untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat, sebagaimana ketahui bahwa salah satu fungsi hukum yaitu mengatur memberi perlindungan atas hak-hak masyaraka.

1. Prosedur pelaksanaan *isbat* nikah

Tidak ada isbat nikah setelah lahirnya Undang-undang Perkawinankecuali perkawinan itu dilangsungkan sebelum Undang-undang itu lahir, namunketentuan itu bisa dikecualikan karena alasan-alasan tertentu seperti tercantum dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Di antara alasan itu ialah adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akad nikah, adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan atau karena adanya perkawinan yang dilakukan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan. Menurut pasal 7 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa.[[41]](#footnote-42)

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
2. .Hilangnya buku Nikah
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
4. Adanya perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
6. Yang berhak mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah suami, istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.[[42]](#footnote-43)

Berdasarkan penjelasan Kompilasi Hukum Islam di atas, dapat disimpulkan bahwa isbat nikah lebih menekankan pada upaya pembuktian dan pengakuan sahnya suatu perkawinan. Hal ini tercermin dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam. Pasal-pasal tersebut memberikan wewenang yang luas kepada Pengadilan Agama untuk mengatasi isbat nikah.

Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa upaya isbat nikah dapat diajukan oleh pihak-pihak tertentu. Hak untuk mengajukan permohonan isbat nikah dimiliki oleh suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang memiliki kepentingan dengan perkawinan tersebut.

Pentingnya pembuktian dan pengabsahan nikah ini menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam memberikan kepercayaan kepada Pengadilan Agama untuk menangani proses isbat nikah dengan kompetensi absolut yang luas. Dengan demikian, isbat nikah diatur secara rinci dalam hukum Islam untuk memastikan bahwa proses ini dapat dilakukan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. **Perceraian**
2. Pengertian perceraian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Berdasarkan informasi tersebut, proses untuk mengakhiri ikatan perkawinan dan melakukan perceraian diatur melalui Pengadilan Agama, dan setelah perceraian, apabila ingin menikah lagi, harus mematuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap perkawinan mesti dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[[43]](#footnote-44)

Perceraian, yang memang sering kali menjadi pengalaman yang sulit dan penuh emosi. Perceraian tidak hanya memengaruhi individu secara pribadi tetapi juga melibatkan dinamika keluarga dan masyarakat. Ungkapan tentang perceraian sebagai perlambang ketidakberhasilan dalam mewujudkan cita-cita untuk memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah mencerminkan pemahaman tentang pentingnya keharmonisan dalam kehidupan keluarga. "Sakinah, mawaddah, dan warahmah" adalah konsep yang diambil dari ayat Al-Quran yang menunjukkan idealisme dan tujuan dari suatu perkawinan dalam Islam. "Sakinah" berarti kedamaian dan ketentraman, "mawaddah" berarti kasih sayang, dan "warahmah" berarti belas kasihan.

1. Macam-macam perceraian

Khususnya dalam Islam, di mana perceraian dianggap sebagai perbuatan yang cenderung tidak disukai oleh Allah swt. Meskipun demikian, pemahaman bahwa perceraian merupakan realitas sosial yang terjadi dalam hubungan suami-istri mencerminkan kesadaran akan kompleksitas dan variasi dalam kehidupan manusia.[[44]](#footnote-45)

Dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-UndangPerkawinan dan tentang Tatacara Perceraian dalam Peraturan Pelaksanaandapat ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian.

* 1. Cerai talak

Secara etimologis, istilah "talak" berasal dari bahasa Arab. Dalam konteks perkawinan dalam Islam, talak memiliki arti membuka ikatan atau melepaskan hubungan pernikahan. Secara harfiah, kata "talak" berasal dari akar kata "t-l-k" yang berarti melepaskan atau membebaskan. Dalam hukum Islam, talak adalah hak suami untuk menceraikan istrinya. Ini adalah suatu bentuk pemutusan perkawinan yang dapat diucapkan oleh suami. Terdapat berbagai bentuk talak, seperti talak satu (sekaligus), talak dua (bertahap), dan talak tiga (bertahap dengan kewajaran waktu tertentu antara talak-talak tersebut). Setelah talak diberikan, ada periode tunggu yang disebut "iddah" yang harus dijalani oleh wanita sebelum dapat menikah lagi.[[45]](#footnote-46)

Menurut Sayyid Sabiq, talak diartikan sebagai tindakan melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Pernyataan ini mencerminkan esensi dasar dari talak dalam konteks Islam. Talak adalah suatu hak yang diberikan kepada suami untuk menceraikan istrinya, dan ini memungkinkan pemutusan sahnya ikatan pernikahan.[[46]](#footnote-47)

* 1. Cerai gugat

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, gugatan cerai yang dimaksudkan adalah cerai gugat, yang terjadi ketika salah satu pihak mengajukan gugatan lebih dahulu kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 132 ayat (1), gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama.Cerai gugat adalah suatu bentuk perceraian di mana gugatan diajukan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan Agama. Gugatan cerai menurut KHI diajukan oleh istri atau kuasanya. Ini menekankan bahwa istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai.[[47]](#footnote-48)

Gugatan cerai harus diajukan pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat. Pengecualian diberikan dalam pasal tersebut, yaitu "kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami. Ini mencerminkan tata cara dan prosedur hukum Islam terkait perceraian di Indonesia, di mana istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama.

1. **Pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara**

Hakim dalam menjalankan profesinya memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai keadilan. Kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagai panduan keutamaan moral bagi hakim, baik pada saat dirinya menjalankan tugas profesi maupun dalam hubungan Masyarakat[[48]](#footnote-49). Adapun kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagai berikut:

* 1. Berprilaku adil

Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Tuntutan masyarakat yang paling mendasar dari keadilan ialah memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang.

* 1. Berprilaku jujur

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakikat yang hak dan batilBerperilaku Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati dan santun.

* 1. Bersikap mandiri

Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.[[49]](#footnote-50)

* 1. Berintegritas tinggi

Integritas tinggi pada hakikatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.

* 1. Bertagung jawab

Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya.

* 1. Menjujung tinggi harga diri

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang.

* 1. Bersikap profesonal

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk tnelaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas[[50]](#footnote-51)

**BAB lll**

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Gambaran Umum Pengadilan Kabupaten Kediri**

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri merupakan salahsatu pengadilan kelas 1A yang berada di Kabupaten Kediri.

1. Sejarah singkat Pengadilan Agama Kabupaten Kediri .

Kabupaten Kediri terletak di Provinsi Jawa Timur dengan koordinat geografis antara 1110 05’ – 1120 03’ Bujur Timur dan 70 45’ – 70 55’ Lintang Selatan. sebagai berikut:

* 1. Sebelah Utara: Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri.
  2. Sebelah Timur: Kecamatan Wates dan Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri.
  3. Sebelah Selatan: Kecamatan Kandat dan Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri.
  4. Sebelah Barat: Kecamatan Grogol dan Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri.[[51]](#footnote-52)

Batas-batas tersebut memberikan gambaran mengenai letak geografis dan lingkungan sekitar Kabupaten Kediri.

35

Kota Kediri pada mulanya menjadi bagian dari Kabupaten Kediri, namun sejak dikeluarkanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta, tanggal 14 Agustus 1950. Kota Kediri resmi menjadi pemerintah Kota Kediri yang terlepas dari pemerintah Kabupaten Kediri.

Kota Kediri yang luas wilayahnya 63,40 Km2 berada pada ketinggian 67 m diatas permukaan air laut, terdiri dari 3 wilayah Kecamatan, yaitu: Kecamatan Kota, Kecamatan Pesantren dan Kecamatan Mojoroto. Seiring dengan sejarah perjalanan kota Kediri, Pengadilan Agama Kediri juga mengalami perubahan-perubahan, baik dari nama, wilayah hukum dan kantornya. Pengadilan Agama Kediri dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, tanggal 14 Januari 1951 yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Kediri dan Kota Kediri. Awal mulanya Pengadilan Agama Kediri bertempat di lingkungan Masjid Agung Kediri, tepatnya di Kelurahan Kampung dalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri yang menempati bekas rumah Bupati Kediri.

Selanjutnya Pengadilan Agama Kediri berpindah tempat dan menempati bekas rumah Asisten Wedono Kediri yang kemudian pindah lagi dan menempati gedung bekas Kantor Urusan Agama Kota Kediri. Selanjutnya Pengadilan Agama Kediri menempati gedung sendiri yang terletak di Jalan Sekartaji, desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri.[[52]](#footnote-53)

1. Visi dan misi
2. Visi

Mewujudkan pengadilan yang profesonal,efektif,efisien dan angkutabel menuju badan peradilan Indonesia yang agung.

1. Misi
2. Meningkatkan kualitas hukum yang pasti transparan dan akutabel.
3. Mewujudkan efektifitas dalam pengelolan peyelesaian perkara.
4. Mewujudkan akses peradilan bagi masarakat miskin dan terpingirkan.
5. Mewujudkan kepatuhan putusan pengadilan.[[53]](#footnote-54)
6. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kelas 1A

Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.[[54]](#footnote-55)

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
4. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Uindang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan dseposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;
7. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya**.[[55]](#footnote-56)**
8. Setruktur organisasi pengadilan agama kab.kediri.

****

1. **Diskipsi Putusan Perkara Nomor 387 / Pdt / G / Pa.Kab. Kediri 2022.**

Pada tanggal 18 Juli 2019, Pemohon berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda serta tidak ada halangan untuk sahnya pernikahan secara hukum Islam, dimana tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. maka dilangsukanya pernikahan atara pemohon/istri dan termohon /suami menurut agama Islam atau secara siri di Musholla Al-Furqon, Ds.doko kabupaten kediri, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu),dan wali nikah Kyai Musholla Al Furqon yang telah dipasrahkan oleh ayah istri Pemohon. Bahwa setelah akad nikah dengan Penggugat, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dihadapan Penggugat dengan saksikan oleh Penghulu, Wali nikah beserta 2 (dua) orang saksi. dengan dihadiri oleh para kerabat dan tetangga. setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah kontrakan 3 tahun, kemudian pindah rumah bersama. Telah hiduprukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak berusia 14 tahun saat ini dalam pengasuhan Penggugat. akan tetapi kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai tersebut tidak berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk didamaikan dan bahkan dipersatukan lagi. Adapun awal perselisihan dan pertengkaran terjadi kurang lebih sejak awal tahun 2020, antara lain disebabkan:

* 1. a) Tergugat tidak ada perhatian dan lepas tanggung jawab terhadap keuangan keluarga, dengan tidak pernah memberikan nafkah ± 2 (dua)tahun lebih kepada Penggugat, sehingga kebutuhan keluarga dari hasil kerja Penggugat.
  2. Demi masa depan keluarga, Penggugat meminta kepastian hukum mengenai status pernikahan dengan Tergugat untuk dicatatkan secara resmi, namun oleh Tergugat tidak segera dilaksanakan dan diberikan janji-janji yang tidak ada kepastian hingga sekarang.

Penggugat sudah bersikap sabar dan mengalah kepada Tergugat, siapa tahu ada perubahan dalam rumah tangganya menjadi lebih baik. Namun kesabaran ada batasanya hingga Penggugat memandang tidak ada sedikit perubahan yang berarti pada sikap diri Tergugat, justru permasalahannya menjadi besar dan meluas dan selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan sampai berlarut-larut dan selama ini Penggugat sudah mencoba berusaha menjalin komunikasi dengan Tergugat, bahkan melibatkan keluarga besar Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari Tergugat dan akhirnya tidak ada titik temu penyelesaian. puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Agustus 2021 menyebabkan Penggugat meninggalkan rumahbersama sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang selama ± 5 bulan serta Tergugat sudah mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami.

berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai harapan dan kecocokkan lagi untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia sebagaimana amanah agama dan undang-undang.

Dalam perkara ini ada dua jenis isbat nikah ada 2 jenis yaitu volunteir,dan kontensius. Volunteir perkara yang pihak hanya terdiri dari pemohon saja, tidak ada pihak termohon. Jika permohonan diajukan suamitu istri secar bersm-sama, dan jik permohonan diajkukan suami/istri yang ditinggal mati oleh suami/istrinya, sedang pemohon tidk mengetahui daahli waris selain dia. Sedangkan isbat nikah kontensius, perkara yang pihaknya terdiri dari pemohon melawan termohon, jika permohonan diajakukan oleh salah seorang suami atau istri dengan mendudukan suami atau istri sebagai pihak termohon, dan atau jika permohonan diajukan suami atau istri sedang salah satau dri suami atau istri teersebut masih ada hubungan perkawainan dengan pihak lain, mka pihak lain tersebut juga harus dijadikan pihak dalam permohonan tersebu dan jika permoh diajukan suami atau istri yang ditinggaal mati suami atau istri, tetapi dia tahu ada ahli wris lainnya selain dia.Serta permohonn diajakukan walinikah ahli waris, atau pihak lain yang berkepentingan.

**PRIMER**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mennyatakan sahnya pernikahan antara Penggugat () dengan Tergugat () yang dilangsungkan pada tanggal, bertepatan tanggal, bertempat di rumah kontrakan Kelurahan Embong Kali Asin Kecamatan Genteng Kota Surabaya.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER**

Atau sekiranya Pengadilan berpendapat lain mohom Putusan yan seadil– adilnya.Bahwa terhadap Permohonan Itsbat Nikah ini telah dilakukan pengumuman melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tanggal 02 Februari 2022, dan selama Pengumuman berlangsung sampai dengan perkara ini disidangkan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/kuasanya hadir ke persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diberikan nasehat tentang keharusan serta perlunya untuk mencatatkan perkawinan yang telah dilangsungkan kepada pejabat yang berwenang;

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Kabupaten Gresik, akan tetapi tidak hadlir dan tidap pula mewakilkan kepada wakil/kuasa yang sah, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti-bukti sebagai berikut :

1. Surat-surat:
2. Fotokopi e-KTP NIK, an., tanggal, yang aslinya dikeluarkan oleh

Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor :, an., tanggal, yang aslinya

dikeluarkan oleh Kantor Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :, an., tanggal, yang aslinya

dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup,

cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3)

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor :, an., tanggal, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4)
2. Saksi-saksi
3. Umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnyamenerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
4. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat.
5. Bahwa benar Para Pemohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara syari’at Islam, di rumah orangtua Penggugat di Surabaya, pada tanggal.
6. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, ijab kabulnya dilakukan oleh Penghulu, dan para hadirin menyatakan sah.
7. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, ijab kabulnya dilakukan oleh Penghulu, dan para hadirin menyatakan sah.
8. Bahwa yang menjadi saksi nikah pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah dan Pamannya, di samping itu juga banyak orang lain yang hadir ikut menyaksikan Akad Nikah Penggugat dan Tergugat tersebut, saksi juga ikut hadi.
9. Bahwa mahar/mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II, berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat, dibayar tunai.
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
11. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ± 2 (dua) tahun lebih kepada Penggugat, sehingga kebutuhan keluarga dari hasil kerja Penggugat.
12. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggl sampai sekarang berlangsung selama 5 bulan tanpa saling komunikasi.
13. Bahwa saksi sebagai Paman Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.
14. umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan KaryawanSwasta, bertempat tinggal di Kabuoaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
15. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Penggugat.
16. Bahwa benar Para Pemohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara syari’at Islam, di rumah orangtua Penggugat di Surabaya, pada tanggal.
17. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, ijab kabulnya dilakukan oleh Penghulu, dan para hadirin menyatakan sah.
18. Bahwa yang menjadi saksi nikah pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah o dan Pamannya, di samping itu juga banyak orang lain yang hadir ikut menyaksikan Akad Nikah Penggugat dan Tergugat tersebut, saksi juga ikut hadir.
19. Bahwa mahar/mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II, berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat, dibayar tunai.
20. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah,semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
21. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ± 2 (dua) tahun lebih kepada Penggugat, sehingga kebutuhan keluarga dari hasil kerja Penggugat.
22. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggl sampai sekarang berlangsung selama 5 bulan tanpa saling komunikasi.
23. Bahwa saksi sebagai Paman Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas. Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, kuasa Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; enimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di Tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan,sedangkan Penjelasannya Huruf (a) angka 9 yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, sehingga perkaraa quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Oktober 2006 di Surabaya, secara syari’at Islam, dan rumah tangga Penggugat dan Terguga sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai legal standing untuk mengajukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah sekaligus gugatan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009:

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat dalam persidangan, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ± 2 (dua)tahun lebih kepada Penggugat, sehingga kebutuhan keluarga dari hasil kerja Penggugat pada puncaknya Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama sampai sekarang berlangsung selama 5 bulan dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga:

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, putusan perkara ini dijatuhkan dengan verstek; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi masing-masing bernama,keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah telah dikaruniai satu orang anak yang bernama, usia 14 tahun saat ini dalam pengasuhan Penggugat
2. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun pada akhirnya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ± 2 (dua) tahun lebih kepada Penggugat, sehingga kebutuhan keluarga dari hasil kerja PenggugatPenggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sampai sekarang berlangsung selama 5 bulan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kediri, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini, telah bermaterai cukup dan sesuaidengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri:

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ± 2 (dua) tahun lebih kepada Penggugat, sehingga kebutuhan keluarga dari hasil kerja Penggugat akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama sampai sekarang berlangsung selama 5 bulan; Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan Iagi untuk kembali rukun:

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

* Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yangterus menerus
* Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun
* Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat makaterbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ± 2 (dua) tahun lebih kepada Penggugat, sehingga kebutuhan keluarga dari hasil kerja Penggugat dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuh

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama sampa sekarang berlangsung selama 5 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Penggugatnsudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi

Menimbang bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahakamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkankemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan” sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:“Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دو العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة

Artinya : “Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebaga imana ditetapkan oleh peraturanperundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba’in shughraa Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek
3. Menyatakan pernikahan Penggugat () dengan Tergugat () yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2006 adalah pernikahan yang sah
4. Menjatuhkan talak satu bai’in sugra Tergugat () terhadap Penggugat
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.383.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Serlasa tanggal 22 Februari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriyah, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. Agus Suntono, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Munasik, M.H. dan Arudji, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Suko, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat/kuasanyatanpa hadirnya Tergugat.[[56]](#footnote-57)

1. **Pertimbagan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Kumulasi Nomor: 387/Pdt /G/Pa.Kab .Kediri**
2. Dalam Perkara nomor 387/Pdt /G/PA.kab kediri proses peyelesaian perkara kumulasi isbat nikah Dan cerai gugat sebagai berikut :
3. Dalam Perkara nomor 387/Pdt /G/PA.kab kediri permohonan Perkara isbat nikah harus di selesaikan terlebih dahulu guna untuk mengsahkan status pernikahaNya, sebagai salah satu syarat pemberkasan cerai gugat di Pengadilan Agama kabpaten kediri bahwa kedua belah pihak suami istri disebut sebagai pemohon satu dan pemohon dua dikarenakan dalam perkara isbat nikah kedua belapihak mermohon untuk disahkan pernikahanya meskipun yang mengajukan perka hanya satu pihak saja, bahwa sebelum sidang berlangsung kedua belah pihak telah dipanggil secara patut di kediaman pemohon satu(istri) dan pemohon dua(suami) Menurut hakim Pengadilan Agama kab kediri Drs. Munasik, M.H. mengatakan bahwa: “Sebelum menuju ketujuan utamanya yaitu cerai gugat maka harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, dan para pihak yang berperkara, suami maupun istri di sebut termohon.[[57]](#footnote-58)

Akan tetapi pada saat persidangan pemohon dua tidak hadir di dalam persidangan, sehingga selama persidangan berlangsung hanya pemohon satu yang diperiksa kelengkapan berkasnya begitupula dengan saksinya pemohon satu menghadirkan dua orang saksi yang hadir pada saat pernikahan antara pemohon satu dan pemohon dua , serta saksi tersebut berada di bawah sumpah Setelah dirasa cukup majelis hakim akan mempertimbangkan dan memusyawarahkan perkara ini, hal demikian dilakukan guna mencegah putusan yang keliru, setelah dirasa cukup majelis hakim menetapkan bahwa perkawinan pemohon satu adalah SAH dan meminta pemohon satu untuk mendaftarkan pernikahanya di KUA (kantor urusan agama) setempat setelah mendapatkan bukti nikah di lanjutkan dengan tujuan utama yaitu cerai gugat.

Menurut hakim Pengadilan Agama kab kediri Drs. Munasik, M.H. mengatakan bahwa:

“Setelah adanya putusan yang diberikan hakim dalam persidangan yang menyatakan bahwa perkawinanya telah SAH maka pihak yang berperkara diberikan surat putusan, sebagai bukti untuk mendapatkan surat nikah dari KUA setempat”.[[58]](#footnote-59)

1. Setelah pernikahan antara pemohon 1 dan pemohon 2 sah, keduanya kemudian dikenal sebagai Penggugat dan Tergugat. Dalam hal ini, Penggugat merujuk pada pihak yang mewakili atau berasal dari pihak istri, sementara Tergugat merujuk pada pihak yang menjadi objek atau pihak yang dihadapkan dalam suatu tuntutan atau gugatan hukum, dan dalam konteks ini, Tergugat berasal dari pihak suami.

Hakim Pengadilan Agama Drs. Munasik, M.H. menyatakan:

"Jika semua dokumen yang diperlukan untuk proses perceraian telah terpenuhi, maka yang sebelumnya disebut pemohon akan berubah menjadi penggugat dan tergugat. Jika permohonan perceraian diajukan oleh pihak istri, maka istilahnya akan menjadi penggugat; sedangkan jika diajukan oleh pihak suami, istilah yang tetap digunakan adalah pemohon dan termohon".[[59]](#footnote-60)

Selama jalannya sidang, tergugat tidak pernah hadir atau mengutus wali sebagai perwakilan di persidangan. Kondisi ini menyebabkan majelis hakim hanya mendapatkan keterangan dari pihak penggugat tanpa adanya partisipasi tergugat. Dalam situasi ini, proses mediasi tidak dapat dilakukan, dan akibatnya majelis hakim terpaksa mengambil keputusan tanpa melibatkan pihak tergugat, yang disebut sebagai putusan *verstek*. **Putusan *verstek*** merujuk pada Pasal 125 Ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa jika pada tanggal yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan perwakilan sebagai penggantinya, meskipun telah dipanggil secara patut, maka gugatan tersebut akan diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali jika pengadilan menemukan bahwa gugatan tersebut melanggar hak atau tidak beralasan.[[60]](#footnote-61)

Menurut Hakim Pengadilan Agama Drs. Munasik, M.H., jika terdapat 2000 perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama dalam satu tahun, maka perkara yang diputus verstek mencapai 1500 perkara, atau setara dengan 70% dari total perkara tersebut.[[61]](#footnote-62)

1. Dalam proses sidang perkara kumulatif ini, keseluruhan permasalahan disatukan dalam satu surat gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan biaya administrasi bagi pihak yang terlibat selama proses peradilan di Pengadilan Agama, serta memudahkan majelis hakim dalam memutuskan perkara ini dengan lebih efisien. Pendekatan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kekeliruan dalam penanganan perkara.

Hakim Pengadilan Agama Drs. Munasik, M.H. menyatakan:

"Perkara kumulasi sebenarnya sangat membantu pihak yang terlibat dalam peradilan, karena dengan menggabungkan semua permasalahan dalam satu surat gugatan, proses administrasi menjadi lebih mudah dan biayanya lebih terjangkau. Hal ini juga dapat mempercepat penyelesaian perkara di persidangan. Bagi kami, majelis hakim, pendekatan ini memudahkan dalam mengambil keputusan tanpa risiko kekeliruan yang dapat merugikan pihak yang berperkara. Tentu saja, dalam menyelesaikan perkara kumulasi, kami selalu mempertimbangkan aturan dan landasan hukum yang berlaku ".[[62]](#footnote-63)

1. Sesuai dengan rumusan masalah tentang bagaimana analisis Pertimbagan majelis hakim dalam memutuskan Perkara kumulasai isbat nikah dan cerai gugat Perkara nomor 387/Pdt /G/PA.kab kediri maka pada sub bab ini adalah analisis kritis terhadap putusan itsbat nikah

Pernikahan siri pemohon yang melibatkan seorang Kyai atau wali Muhakkam sebagai wali nikah yang telah diberi wewenang oleh ayah kandung istri Pemohon. berdasarkan fakta-fakta kejadian sebelumnya, disebutkan bahwa sejak pernikahan dimulai, Pemohon dan istrinya tidak pernah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, pernikahan Pemohon tidak tercatat dalam daftar resmi Kantor Urusan Agama. sehingga pemohon tidak memiliki akta nikah meskipun pernikahan Pemohon dan istri Pemohon telah dilaksanakan menurut syariat Islam. Oleh karena itu Pemohon mengajukan itsbat nikah ke pengadilan Agama kabuaten kediri untuk mendapatkan Penetapan Itsbat Nikah, Supaya Pernikahan tersebut dapat tercatatkan di kua dan memiliki kekuatan hukum serta dapat dijadikan sebagai alashukum dalam mengurus akta kelahiran anak Pemohon.

Menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut Isbat nikah bisa dilakukan jika terdapat perkawinan dalam rangka menyelesaikan perceraian. Proses isbat nikah bisa dilakukan baik secara sukarela maupun melalui perselisihan, dan bisa digabungkan dengan proses perceraian (baik talak atau gugatan). Pemeriksaan isbat nikah terbuka untuk umum, sementara pemeriksaan perkara perceraian dilakukan secara tertutup untuk umum Dalam konteks ini, hukum acara memberikan perhatian khusus dengan mengizinkan penggabungan antara perkara isbat nikah dan gugatan cerai. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mencakup prosedur pengadilan agama yang memungkinkan penggabungan dua perkara tersebut. Namun, jika diajukan secara terpisah, setiap gugatan akan diperiksa secara terpisah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam kasus yang sedang dianalisis oleh peneliti, pemeriksaannya dilakukan secara tertutup untuk umum karena pokok perkara adalah perceraian. M Yahya Harahap menjelaskan bahwa Penggabungan isbat nikah dan gugat cerai dapat dilaksanakan dengan 3 alasan yaitu:

1. Adanya hubungan hukum yang sangat erat antara kedunya (innerlijke samenhangen.
2. Ketatnya acara pembuktian Isbat Nikah dibandingkan dengan pembuktian asal usul anak.
3. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Menurut analisis peneliti, Isbat Nikah dan Cerai Gugat memiliki hubungan hukum yang erat karena beberapa alasan: Pertama, keduanya berkaitan dengan institusi perkawinan. Kedua, gugatan cerai mengasumsikan bahwa kedua pihak seharusnya telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Ketiga, jika kedua belah pihak belum terikat dalam perkawinan yang sah, maka diajukanlah kumulasi isbat nikah dan cerai. Konsekuensi dari pengajuan kumulasi gugatan tersebut adalah hak-hak yang terkait akan diakomodasi baik untuk kedua belah pihak maupun keturunan mereka.

1. **Dampak Hukum Yang Ditimbulkan Dari Putusan Perkara Kumulasi Nomor: 387/Pdt /G/Pa.Kab .Kediri**
2. Dampak hukum yang di timbulkan dari putusan perkara nomor 387/Pdt/G/PA.kab kediri sebagai berikut:
3. Kejelasan dan kepastian hukum status perkawinan, sehingga hak-haknya akan terlindungi. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Talak merupakan perceraian karena suami atau kuasa hukumnya yang mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan.
4. Drs.Agus Susanto,M.H.I.sebagai hakim ketua yang menangani kasus tersebut "mengatakan Perihal kumulasi gugatan juga terdapat dalam beberapa yurisprudensi,yaitu dlam putusan Mahkamah Agung Nomor 575K/Pdt/1983 yang menjelaskan bahwa penggabungan benar-benar menyederhanakan proses pernikahan, biaya menjadi lebih murah, tidak memerlukan banyak waktu dan menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan. Adanya putusan dari MA keberadaan kumulasi gugatan menjadi lebih jelas, karena di Indonesia yurisprudensi MA yang telah beberapa digunakan sebagai acuan para Hakim untuk memutus suatu perkara yang sama sehingga dapat menjadi sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara relatif " .[[63]](#footnote-64)
5. Jadi dasar hukum kumulasi ini bisa ditemukan dalam Pasal 66 ayat (5) Peradilan Agama. Pasal tersebut menyatakan bahwa permohonan terkait penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri bisa diajukan secara bersamaan dengan permohonan cerai atau setelah ikrar talak diucapkan. Jadi, memungkinkan untuk menggabungkan berbagai tuntutan tersebut dalam satu proses hukum[[64]](#footnote-65). Dan pasal 86 ayat (1) tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”.[[65]](#footnote-66)

Penggabungan gugatan ini juga diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tetang Peradilan Agama Undang-undang No. 3 Tahun 2006, Kumulasi gugatan yang dimaksud adalah kumulasi gugat cerai dan engesahan perkawinan. Dalam pasal 86 yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara kumulasi gugatan di Pengadilan Agama.[[66]](#footnote-67)

1. Dalam rumusan masalah tersebut analisa Dampak hukum yang di timbulkan dari putusan perkara nomor 387/Pdt/G/PA.kab kediri
2. Mewujudkan peradilan yang sederhana dapat dilakukan dengan menggabungkan beberapa gugatan ke dalam satu gugatan tunggal. Hal ini memungkinkan penyelesaian beberapa perkara melalui proses tunggal yang dipertimbangkan dan diputuskan dalam satu putusan. Sebaliknya, jika setiap gugatan diajukan secara terpisah dan mandiri, maka akan memerlukan proses penyelesaian terhadap setiap perkara secara terpisah, yang bertentangan dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
3. Menghindari timbulnya putusan yang saling bertentangan dalam kasus yang sama adalah salah satu manfaat dari sistem penggabungan gugatan. Dengan cara ini, jika terdapat keterkaitan antara beberapa gugatan, langkah yang efektif untuk mencegah terjadinya putusan yang saling bertentangan adalah melalui sistem kumulasi atau penggabungan gugatan. Menurut Subekti, untuk menghindari potensi putusan yang saling bertentangan dalam kasus yang terkait, seperti ketika ada beberapa perkara yang berkaitan di pengadilan negeri yang sama dengan pihak yang sama terlibat, langkah yang lebih tepat adalah menggabungkan perkara-perkara tersebut menjadi satu, sehingga diperiksa oleh satu majelis pengadilan saja.

**BAB IV**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap Putusan Pengadilan

Agama Kab kediri Nomor perkara: 387/Pdt. G/2022. tentang itsbat nikah dan cerai gugat setelah dilakukan analisis terhadap penetapan tersebut yang dikaitkan dengan landasan teori, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap Putusan Perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat Nomor 387/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kediri sacara garis besar diselesaikan dalam 5 tahapan, yaitu:

proses pemeriksaan perkara isbat nikah dalam sidang yang terbuka.

1. proses mediasi yang dibantu oleh seorang mediator.
2. Ketiga, proses pemeriksaan gugatan perceraian dalam sidang yang tertutup.
3. rapat permusyawaratan majelis hakim
4. pembacaan putusan mengenai perkara yang dikumulasikan dalam siding yang terbuka.

Problematika yang dihadapi hakim dalam menyelesaikan perkara kumulasi gugatan itsbat nikah dan cerai gugat ialah adanya dua ketentuan hukum acara yang berbeda dalam satu session persidangan, pertama ketentuan hukum acara sidang yang terbuka, yaitu hukum acara yang digunakan dalam menyelesaikan perkara isbat nikah dan kedua ketentuan hukum acara sidang yang tertutup yaitu hukum acara yang digunakan dalam menyelesaikan perkara cerai gugat.

66

1. Landasan hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara gugatan isbat nikah dan cerai diantaranya:

75

1. Hakim memutus perkara secara verstek dengan alasan Tergugat sudah dipanggil secara patut, namun tergugat tidak pernah hadir. Landasan hukumnya ialah Pasal 125 ayat (1) HIR.
2. Hakim menyatakan sah pernikahan antara P dan T berdasarkan bukti Surat Keterangan Menikah dari Kepala Desa dan kesaksian para saksi yang mengatakan saksi menghadiri acara pernikahan antara P dan T. Landasan hukumnya ialah Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. hakim menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan dari keterangan saksi yang mengatakan keadaan rumah tangga P dan T sudah tidak rukun lagi dan T sudah menikah lagi. Landasan hukumnya ialah Pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
4. **Saran**

Dalam kasus ini yang sangat penting harus diperhatikan adalah pemeliharaan terhadap kesejahteraan dan keperdataan anak dari hasil pernikahan tersebut.

1. Bagi pasangan yang ingin melakukan perkawinan hendaknya mencatatkan perkawinan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat dan melindungi hak-hak suami, istri dan anak.
2. Untuk pemerintah agar mengadakan kepada masyarakat terkait adanya syarat dan rukun nikah, agar masyarakat tahu bahwa perkawinan itu haru di catat kan di kua supaya kedepan nya tahu resiko yang akan di hadapi.

**DAFTAR PUSTAKA,**

**Refensisi buku :**

Titik Triwulan Tutik*, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasiona*l (Jakarta: Kencana, 2008), 108.

Martha Eri Safira, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalamteori Dan Praktik*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2021),

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 121.

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), 82

Tim Akoer, UUD 1945 *Super Lengkap Dan Sususnan Kabinet Kerja Formasi Terbaru/Reshuffle* (Bekasi: Akoer, 2015), 33.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 13-14.

Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian *Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2017), 141

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 102 Sri Wardah & Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia* (yogyakarta: Gama Media, 2007), 67.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 103

Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,

(Jakarta:Kencana,2004), h. 207.

**Referensi Jurnal Dan Artikel Ilmiah:**

H.A. Mukti Arto, Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 29.

Armalina dan Ardiana Hidayah, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah,* Solusi Volume 18 Nomor 1, Januari 2020, 24-26.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarata: UI Press, 2010), 52. Fandi Rosi Sarwo Edi, Teori *Wawancara Psikodignostik*, (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2016), 3. 0Supardi, *Metodologi Penelitain Ekonomi & Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press,2005), 136-137

ade Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif.,* 152-153.

*Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: 2 Balai Pustaka, 1988, hlm. 199.

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, h. 42.

Wildan Suyuti, *Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan*, h.26

Sudikno Mertokusumo, op. cit., hlm.42

Makamah agung, Putusan Perkara nomor 387/Pdt /G/PA.kab kediri,2022.

69

**Skripsi:**

Zuni Ayu Pratiwi, “*Analisis Yuridis Terhadap Itsbat Nikah Karena Pernikahan Siri Oleh Wali Muhakkam Dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan* No. 720/Pdt.P/2017/PA.Bkl. ”, Skripsi (Surabaya: UIN Surabaya, 2018)

Muhammad Bima Setiawan, "*Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Tentang Itsbat Nikah Pernikahan Siri* (Studi Perkara Nomor: 388/Pdt. G/2020/PA. Po", Skripsi, (Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2022)

Nur Halimah, “*Wali Nikah Menurut Imam Malik dan Imam Syafi‟i,*” Skripsi (Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2017)

**Peraturan :**

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

UU. No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 8

Pa Pasal 114 *Kompilasi Hukum Islam “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak ataupun berdasarkan gugatan perceraia* sal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 66 ayat (5) tentang Peradilan Agama

pasal 86 ayat (1) tentang Peradilan Agama

**Internet :**

http://pa-kediri.go.id/ di akses pada tangga 27 oktober 2023

https://fahum.umsu.ac.id di akses pada tangga 20 november 2023

1. Departemen Agama RI, *al Qur’an Al Karīm dan Terjemah*, [↑](#footnote-ref-2)
2. Umar Haris, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 11. [↑](#footnote-ref-3)
3. Ibid., 22. [↑](#footnote-ref-4)
4. Pasal 01 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang perkawinan. [↑](#footnote-ref-5)
5. Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2008), 108. [↑](#footnote-ref-6)
6. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. [↑](#footnote-ref-7)
7. Umarwan Soetopo dan Martha Eri Safira, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalamteori Dan Praktik*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2021), 3. [↑](#footnote-ref-8)
8. Zuni Ayu Pratiwi*,* “Analisis Yuridis Terhadap Itsbat Nikah Karena Pernikahan Siri Oleh Wali Muhakkam Dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No. 720/Pdt.P/2017/PA.Bkl. ”, *Skripsi* (Surabaya: UIN Surabaya, 2018), 10. [↑](#footnote-ref-9)
9. Nur Halimah, “Wali Nikah Menurut Imam Malik dan Imam Syafi‟i,” *Skripsi* (Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2017), 2. [↑](#footnote-ref-10)
10. Muhammad Bima Setiawan,"Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Tentang Itsbat Nikah Pernikahan Siri (Studi Perkara Nomor:388/Pdt. G/2020/PA.Po",*Skripsi*, (Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2022), 2. [↑](#footnote-ref-11)
11. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu tinjauan Singkat*), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 13-14. [↑](#footnote-ref-12)
12. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarata: UI Press, 2010), 52. [↑](#footnote-ref-13)
13. Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2017), 141. [↑](#footnote-ref-14)
14. Ibid., 143. [↑](#footnote-ref-15)
15. Ibid. [↑](#footnote-ref-16)
16. Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 118-119. [↑](#footnote-ref-17)
17. Fandi Rosi Sarwo Edi, Teori Wawancara Psikodignostik, (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2016), 3. [↑](#footnote-ref-18)
18. 0Supardi, Metodologi Penelitain Ekonomi & Bisnis, (Yogyakarta: UII Press,2005), 136-137 [↑](#footnote-ref-19)
19. Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*., 152-153. [↑](#footnote-ref-20)
20. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta:Balai Pustaka,1988, hlm. 199. [↑](#footnote-ref-21)
21. M. Yahya Harahap*, Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 102 [↑](#footnote-ref-22)
22. UU. No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

    Agama Pasal 8. [↑](#footnote-ref-23)
23. Sri Wardah & Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata* dan Perkembangannya di Indonesia

    (yogyakarta: Gama Media, 2007), 67. [↑](#footnote-ref-24)
24. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 103 [↑](#footnote-ref-25)
25. Ibid 103. [↑](#footnote-ref-26)
26. Ibid 103. [↑](#footnote-ref-27)
27. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata,* h. 42. [↑](#footnote-ref-28)
28. Abdul Manan*, Penerapan Hukum Acara Perdata,* h.42 [↑](#footnote-ref-29)
29. Wildan Suyuti, *Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama Dalam Tanya*

    *Jawab*, (Balitbang Diklat Kumdil MA RI, 2008), h.26 [↑](#footnote-ref-30)
30. Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata, h. 43 [↑](#footnote-ref-31)
31. Wildan Suyuti*, Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan*, h.26 [↑](#footnote-ref-32)
32. Sudikno Mertokusumo, op. cit., hlm.42 [↑](#footnote-ref-33)
33. Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Bandung:

    Mandar Maju, 1989, hlm. 55 [↑](#footnote-ref-34)
34. Ibid, hlm. 55 [↑](#footnote-ref-35)
35. M.Yahya Harahap, op. cit., hlm.104 [↑](#footnote-ref-36)
36. Abdul manan, op cit hlm 42 [↑](#footnote-ref-37)
37. Ahmad Sanusi, “*Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang*,” Ahkam 16,

    No. 1 (2016), 114. [↑](#footnote-ref-38)
38. Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam untuk IAIN, STAIN, PTAIS (Bandung: CV

    Pustaka Setia, 2000), h. 11-13 [↑](#footnote-ref-39)
39. Djamaan Nur, *Fiqh Munakah*at (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), 1 [↑](#footnote-ref-40)
40. Royan Bawono, "Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut Kuh Perdata Dan Khi Indonesia", *Lentera, Vol. 4, No. 2, 2022*, 72. [↑](#footnote-ref-41)
41. G.Achyar*, Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Seri Pustaka Yustisia, 2004). h. 2. [↑](#footnote-ref-42)
42. Ibid., 73. [↑](#footnote-ref-43)
43. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. [↑](#footnote-ref-44)
44. Pasal 114 *Kompilasi Hukum Islam* “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena

    perceraian dapat terjadi karena talak ataupun berdasarkan gugatan perceraia.’’ [↑](#footnote-ref-45)
45. Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,

    (Jakarta:Kencana,2004), h. 207. [↑](#footnote-ref-46)
46. Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,

    (Jakarta:Kencana,2004), h. 207. [↑](#footnote-ref-47)
47. G.Achyar, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Seri Pustaka Yustisia, 2004). h. 17. [↑](#footnote-ref-48)
48. Armalina dan Ardiana Hidayah, Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah, Solusi Volume 18 Nomor 1, Januari 2020, 24-26. [↑](#footnote-ref-49)
49. Ibid. [↑](#footnote-ref-50)
50. Ibid. [↑](#footnote-ref-51)
51. <http://pa-kediri.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>,(di akses pada tanggal 10 desember 2023,pukul 13.25). [↑](#footnote-ref-52)
52. <http://pa-kediri.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> ,(di akses pada tanggal 10 desember 2023,pukul 13.25). [↑](#footnote-ref-53)
53. <http://pa-kediri.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/visi-dan-misi> ,(di akses pada tanggal 10 desember 2023,pukul 13.25). [↑](#footnote-ref-54)
54. <http://pa-kediri.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/visi-dan-misi>,(di akses pada tanggal 10 desember 2023,pukul 13.28). [↑](#footnote-ref-55)
55. <https://www.pa-kedirikab.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/tugas-fungsi>,(di akses pada tanggal 10 desember 2023,pukul 13.30). [↑](#footnote-ref-56)
56. Makamah agung, *Putusan Perkara nomor 387/Pdt /G/PA.kab kediri,*2022. [↑](#footnote-ref-57)
57. Dasri nakil, (Hakim Pengadilan Agama kab kediri), wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama kab kediri, (15 desember 2023) [↑](#footnote-ref-58)
58. Dasri nakil, (Hakim Pengadilan Agama kab kediri), wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama kab kediri, (15 desember 2023) [↑](#footnote-ref-59)
59. Dasri nakil, (Hakim Pengadilan Agama kab kediri), wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama kab kediri, (15 desember 2023) [↑](#footnote-ref-60)
60. Samsul arifin ‘’isbat nikah dan caerai gugat,’’https://fahum.umsu.ac.id,(diakses pada tanggal 20 november 2023,jam 15.05). [↑](#footnote-ref-61)
61. Dasri nakil, (Hakim Pengadilan Agama kab kediri), wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama kab kediri, (15 desember 2023) [↑](#footnote-ref-62)
62. Dasri nakil, (Hakim Pengadilan Agama kab kediri), wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama kab kediri, (15 desember 2023) [↑](#footnote-ref-63)
63. Dasri nakil, (Hakim Pengadilan Agama kab kediri), wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama kab kediri, (15 desember 2023) [↑](#footnote-ref-64)
64. Pasal 66 ayat (5) tentang Peradilan Agama [↑](#footnote-ref-65)
65. pasal 86 ayat (1) tentang Peradilan Agama [↑](#footnote-ref-66)
66. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tetang Peradilan Agama jo. Undang-undang No. 3

    Tahun 2006 [↑](#footnote-ref-67)